

## Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2022

Muhammad Quranul Kariem<sup>1)</sup>, Muhammad Iqbal<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Indo Global Mandiri

<sup>2)</sup> Department of Political Science, National Cheng Kung University, Taiwan

Jl. Jenderal Sudirman, No. 629, Km. 4,5 Kota Palembang

Email : [mquranul@uigm.ac.id](mailto:mquranul@uigm.ac.id) ; [u18097019@ncku.edu.tw](mailto:u18097019@ncku.edu.tw)

### ABSTRACT

*The oversight function is one of the three functions possessed by the legislature. The oversight function will have an impact on establishing good 'checks and balances' for the government. The weak composition of political support for the Governor and Deputy Governor of South Sumatra for the 2018-2023 period has made the intensity of oversight carried out by the legislature quite high. The research method used in this research is the literature review method using secondary data from credible sources. The results of the study show that the DPRD of South Sumatra Province uses a priori and a-posteriori types of supervision which are almost balanced, but there is no control mechanism for the actions that have been taken, making the effectiveness of this supervision unable to be assessed.*

**Keywords :** *Suprevision, DPRD, Policy*

### ABSTRAK

*Fungsi pengawasan merupakan salah satu dari tiga fungsi yang dimiliki oleh institusi legislatif. Fungsi pengawasan akan berdampak pada pembentukan 'check and balances' yang baik untuk pemerintah. Komposisi dukungan politik Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan periode 2018-2023 yang cukup lemah, membuat intensitas pengawasan yang dilakukan oleh legislative menjadi cukup tinggi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kajian Pustaka dengan menggunakan data-data sekunder dari sumber yang kredibel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Provinsi Sumatera Selatan menggunakan jenis pengawasan apriori dan a-posteriori yang hampir seimbang, namun tidak adanya mekanisme kontrol atas tindakan yang telah dilakukan, membuat pengawasan tersebut tidak dapat dinilai efektivitasnya.*

**Kata Kunci :** *Pengawasan, DPRD, Kebijakan*

### 1. Pendahuluan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan periode 2019-2024 secara resmi melaksanakan fungsi legislatif, pasca pelantikan tanggal 24 September 2019. DPRD Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 75 (tujuh puluh lima) anggota yang berasal dari 11 (sebelas) partai politik, dengan komposisi sebagai berikut, yaitu Partai Golkar memiliki mayoritas jumlah kursi dengan 13 anggota, PDI Perjuangan memiliki 11 anggota, Partai Gerindra memiliki 10 anggota, Partai Demokrat memiliki 9 anggota, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki 8 anggota, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki 6 anggota, Partai NasDem memiliki 5 anggota, Partai Amanat Nasional (PAN) memiliki 5 anggota, Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) memiliki 3 anggota, Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) memiliki 3 anggota, dan terakhir Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memiliki 1 anggota (<https://dprd.sumselprov.go.id/>, 2019).

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, bahwa anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan memiliki fungsi legislatif yaitu fungsi legislasi

(pembentukan peraturan daerah), fungsi anggaran (terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), dan fungsi pengawasan (mengawasi kebijakan/program dari pemerintah daerah). Dalam konteks fungsi pengawasan, DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada prinsipnya memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan/program dari Gubernur dan Wakil Gubernur yang memimpin Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Herman Deru dan Mawardi Yahya menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan periode 2018-2023 dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumatera Selatan Tahun 2018 (<https://www.cnnindonesia.com/>, 2018), mereka diusung oleh Partai NasDem, Partai HANURA, dan PAN (<https://www.cnnindonesia.com/>, 2018).

Komposisi kekuatan dukungan politik Herman Deru dan Mawardi Yahya di DPRD Provinsi Sumatera Selatan relative kecil, yaitu hanya 14 kursi dari total 75 kursi atau hanya sekitar 19%. Realitas politik ini, seharusnya membuat dinamika politik di DPRD Provinsi Sumatera Selatan akan menjadi lebih dinamis. Hal ini secara ideal juga akan berdampak pada lebih efektifnya fungsi pengawasan yang dilakukan dalam menciptakan *check and balances* dalam pemerintahan. Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Sumatera Selatan terhadap

kebijakan/program dari Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan terdapat dalam berbagai aspek, yaitu diantaranya adalah terkait dengan persoalan perbaikan infrastruktur jalan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tidak dilengkapi dengan sistem *drainase* yang baik (<https://www.rmolsumsel.id/>, 2022). Pada tahun 2019 yang lalu, DPRD Provinsi Sumatera Selatan juga memberikan kritik terhadap persoalan ganti rugi kepada masyarakat dalam proyek infrastruktur yaitu pembangunan jembatan musi IV (<https://beritasebelas.id/>, 2019).

Masih dalam konteks infrastruktur lainnya, DPRD juga memberikan desakan kepada Gubernur agar dapat menyampaikan kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR), untuk dapat segera melakukan perbaikan infrastruktur jalan nasional yang menghubungkan beberapa daerah yaitu Palembang – Betung – Musi Banyuasin – Musi Rawas (<https://www.rmolsumsel.id/>, 2022). Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD Provinsi Sumatera Selatan juga memberikan beberapa rekomendasi pada bidang kesejahteraan, pembangunan, keuangan, serta pemerintahan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan pada rapat paripurna istimewa ke 28 pada tahun 2021 yang lalu (<https://sumselpost.co.id/>, 2021).

Pada tahun 2020 yang lalu, DPRD juga memberikan kritik terhadap surat edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur terkait dengan penundaan pembelajaran tatap muka dan pengalihan pada pembelajaran jarak jauh, dimana dewan berpandangan bahwa belum ada standarisasi terkait pembelajaran jarak jauh pada setiap sekolah, sehingga kebijakan tersebut perlu dikoreksi (<https://sumselpost.co.id/>, 2021). Beberapa hal yang telah diuraikan diatas menunjukkan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan berjalan dengan cukup dinamis, oleh karena itu berbagai contoh kasus tersebut menarik untuk dianalisis lebih lanjut melalui kajian ilmiah.

Penelitian mengenai Fungsi Pengawasan DPRD telah banyak dilakukan, diantaranya adalah penelitian dari Anwar dan Alam (2020) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh factor iklim politik di DPRD terkait dengan poros koalisi dan poros oposisi yang mengakibatkan terhambatnya pengawasan yang dilakukan. Hasil penelitian tersebut sesungguhnya menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan tidak serta merta dapat dilaksanakan sesuai dengan *legal*. Penelitian dari Kariem (2018) juga menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kepada Pemerintah Daerah hanya direspon secara administrative semata, karena adanya dominasi kekuasaan dari eksekutif. Dewan yang merupakan unsur yang penting dalam pelaksanaan kekuasaan dinegasikan peranan yang dimilikinya.

Penelitian dari Kurniawan (2018) juga menunjukkan hal yang serupa, yang menjelaskan bahwa tidak ada pengaturan yang jelas terhadap mekanisme pengawasan

yang dilakukan DPRD. Tujuan daripada pengawasan yang dilakukan ada untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam rangka memastikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian dari Ma'ruf (2019) juga menjelaskan hal yang serupa, bahwa pengawasan yang dilakukan DPRD tidak sistematis dan cenderung sporadis dalam praktiknya. Dari dua penelitian tersebut, fungsi pengawasan yang dimiliki oleh dewan tidak benar-benar dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Penelitian dari Saputra (2019) juga menyebutkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD tidak dapat berjalan dengan baik karena adanya berbagai hambatan administrative dan non-administratif. Adhitana, dkk (2018) juga menyimpulkan terkait dengan tidak efektifnya fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPRD kepada Pemerintah Daerah. Dari beberapa penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa memang terjadi permasalahan yang cukup fundamental mengenai salah satu fungsi legislative, yaitu fungsi pengawasan, dimana factor-faktor formal maupun informal selalu melatarbelakangi ketidakefektifan fungsi tersebut. Maka dari itu, penelitian ini akan memberikan sudut pandang baru mengenai fungsi pengawasan dalam perspektif kekuatan politik.

Menurut Syafiie (2014) Legislatif adalah lembaga yang membuat undang-undang disebut juga parlemen karena *parle* berarti bicara, artinya mereka harus menyampaikan pendapatnya sebagai artikulasi kepentingan dan agregasi kepentingan masyarakat. Mereka diambil dari partai politik karena merupakan perwujudan politik masyarakat. Legislatif sebagai bagian dari dalam pembagian kekuasaan ditransformasikan menjadi Lembaga pemerintahan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tingkat pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada tingkat daerah.

Hubungan legislative yang kuat dengan eksekutif yang lemah memang akan berdampak pada pembangunan politik, namun akan mengakibatkan pembangunan ekonomi yang merosot, kondisi tersebut juga berlaku untuk hal yang sebaliknya (Syafiie, 2014). Fungsi pengawasan menjadi fungsi yang fundamental dalam kerangka pembagian kekuasaan. Dalam konteks teoritis, pengawasan menurut Terry yang dikutip oleh Sakti & Fauzia (2018) bahwa terdapat tiga Langkah dalam pengawasan, yang pertama adalah untuk melakukan pengukuran hasil pekerjaan, yang kedua adalah melakukan komparasi hasil pekerjaan dengan standar yang telah ditetapkan untuk dapat memastikan hasilnya, dan yang ketiga adalah melakukan koreksi terhadap penyimpangan dan tidak diinginkan melalui upaya Tindakan perbaikan.

Paulus Effendi Lotulung sebagaimana dikutip dalam Sulaiman (2017) bahwa terdapat 2 (dua) jenis pengawasan dalam konteks pelaksanaannya, yaitu pertama adalah pengawasan *a-priori* merupakan pengawasan dilakukan sebelum kebijakan dikeluarkan sebagai pendekatan preventif untuk mencegah kesalahan

dalam pembuatan kebijakan. Kedua adalah pengawasan *a-posteriori* merupakan pengawasan dilakukan setelah kebijakan dikeluarkan sebagai pendekatan korektif untuk memulihkan kebijakan yang keliru. Konsepsi teori tersebut sesungguhnya sangat relevan dengan kondisi penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini, dimana otonomi diberikan dalam berbagai aspek di daerah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi Pustaka berdasarkan data-data sekunder yang dikumpulkan dan dianalisis untuk menjadi suatu kesimpulan dalam penelitian ini (Zed, 2018). Data-data sekunder tersebut didapatkan melalui sumber-sumber informasi yang kredibel dari hasil berita jurnalistik. Penelitian ini akan menguraikan terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan pendekatan perspektif teori pengawasan yang dikemukakan oleh Paulus Effendi Lotulung.

## 2. Pembahasan

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari hasil implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, terdapat beberapa kasus diantaranya yang pertama adalah terkait dengan penyaluran program keluarga harapan (PKH) di Kota Palembang, dimana anggota dewan memberikan kritik keras kepada Dinas Sosial terkait dengan rendahnya masyarakat miskin yang menerima program tersebut, yaitu hanya sebanyak 45.700 kepala keluarga dengan nilai lebih dari Rp. 102 Milyar, yang dianggap masih jauh dari kuantitas angka kemiskinan di Kota Palembang. Selain itu, anggota dewan juga mengkritisi terkait dengan tidak *update* nya data kemiskinan sehingga yang menerima bantuan akan tepat sasaran (<https://beritapagi.co.id/>, 2021). Pengawasan ini masuk dalam jenis pengawasan *a-posteriori*, dimana kebijakan penyaluran PKH telah dilaksanakan, namun proses implementasi kebijakan tersebut dianggap masih banyak kekurangan karena factor rendahnya realisasi serta terkait dengan proses pendataan yang buruk.

Pada kasus kedua, anggota dewan juga menyampaikan kritik terhadap pemberian anggaran sebesar Rp. 16 Milyar dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada tahun anggaran 2021 untuk pembelian gerbong dan kontainer batubara (<https://beritapagi.co.id/>, 2021). Kasus ketiga terkait dengan asset daerah, pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan, bahwa Gubernur diminta untuk data terkait dengan asset daerah agar dapat dikelola dengan lebih baik dan inovatif. Anggota dewan juga meminta agar pelaksanaan tugas menjadi lebih baik, diperlukan organisasi perangkat daerah yang khusus mengelola asset daerah. (<https://beritapagi.co.id/>, 2021). Kasus kedua dan ketiga tersebut mencerminkan jenis pengawasan *apriori* dilakukan oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan, dimana dalam hal ini terdapat Langkah preventif dalam pemberian anggaran kepada salah satu BUMD serta terkait dengan saran dalam

pengelolaan asset agar dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Kasus keempat adalah terkait dengan panjangnya antrean masyarakat di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang terjadi diberbagai tempat di Sumatera Selatan. Masalah yang terjadi ini membuat anggota dewan mengambil keputusan untuk memanggil PT. Pertamina kantor perwakilan Sumatera Selatan (<https://sumsel.antaranews.com/>, 2022). Hal ini mencerminkan pendekatan pengawasan *a-posteriori* yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan, dimana terdapat masalah terlebih dahulu, yaitu antrean Panjang pada SPBU, yang ditindaklanjuti oleh dewan dengan melakukan Tindakan koreksi berupa pemanggilan tersebut. Kasus kelima adalah terkait dengan masalah mogok kerja karyawan PT. Jakabring Sport City (JSC) yang merupakan BUMD, yang diakibatkan karena tidak dibayarkannya gaji selama hampir 10 (sepuluh) bulan (<https://palembang.tribunnews.com/>, 2021). Masalah ini juga diselesaikan dengan Tindakan koreksi yang dilakukan dengan melakukan pemanggilan terhadap direksi BUMD tersebut. Penyelesaian masalah yang dilakukan dewan tersebut juga masuk dalam jenis pengawasan *a-posteriori*.

Kasus keenam adalah terkait dengan kebijakan distribusi vaksin Sinovac tahap pertama sebanyak 30.000 vaksin pada tahun 2021 yang lalu di Sumatera Selatan. Anggota dewan dalam hal ini memastikan terkait uji klinis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta akan melakukan peninjauan ke setiap daerah, untuk memastikan bahwa dinas Kesehatan benar-benar telah memberikan vaksin ke masyarakat (<https://sumselpost.co.id/>, 2021). Dalam konteks pengawasan, yang dilakukan dewan tersebut masuk dalam kategori pengawasan *apriori*, dimana Tindakan preventif dilakukan dalam rangka memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu agar supaya masyarakat mendapatkan vaksinasi yang merata untuk menciptakan *herd immunity*.

Pada tahun 2020 yang lalu, anggota dewan juga meminta agar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan pengecekan terhadap Riwayat orang yang masuk pada wilayah Sumatera Selatan serta melakukan kebijakan pengetatan antar daerah (<https://www.gatra.com/>, 2020). Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dalam kasus ketujuh ini, merupakan jenis pengawasan *apriori*, dimana pendekatan yang dilakukan adalah secara preventif agar perumusan kebijakan yang akan dilaksanakan menjadi lebih baik dan efektif. Pelaksanaan fungsi pengawasan anggota dewan memang menjadi salah satu instrument dalam mewujudkan *check and balances* dalam pemerintahan, sehingga menghasilkan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Kebijakan pembangunan infrastruktur juga tidak terlepas dari fungsi pengawasan yang dilakukan oleh

dewan, dimana pada kasus kedelapan ini anggota dewan mendorong percepatan pembangunan infrastuktur di Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA) melalui upaya untuk komunikasi kepada Gubernur dimasukkan dalam usulan bantuan gubernur Sumatera Selatan pada tahun 2023 (<https://beritapagi.co.id/>, 2022). Pengawasan tersebut masuk dalam kategori pengawasan *apriori*, karena anggota dewan melakukan upaya preventif sebelum perumusan kebijakan infrastruktur dengan mendorong salah satu daerah untuk dapat diprioritaskan pembangunan infrastrukturnya. Kebijakan infrastruktur terkait dengan perbaikan jalan antar kabupaten di Sumatera juga menjadi sasaran dari pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan. DPRD berpendapat bahwa kondisi infrastruktur jalan di beberapa Kabupaten di Sumatera Selatan kondisinya rusak parah dan menyulitkan transportasi masyarakat yang akan berdampak merugikan perekonomian, maka dari itu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diminta untuk dapat segera melakukan perbaikan dengan memaksimalkan penggunaan sisa anggaran (<https://beritapagi.co.id/>, 2022). Kasus kesembilan ini masuk dalam jenis pengawasan *apriori*, karena sebelum perumusan kebijakan perbaikan infrastruktur jalan, dewan melakukan Tindakan preventif untuk dapat memberi prioritas terhadap kondisi jalan yang rusak dengan memaksimalkan sisa anggaran.

Kasus kesepuluh adalah terkait dengan banyaknya *driver* ojek online yang tidak mendapatkan BLT BBM (Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak), hal itu membuat anggota dewan akan melakukan pemanggilan terhadap dinas sosial serta usulan untuk melakukan perbaikan data masyarakat (<https://beritapagi.co.id/>, 2022). Jenis pengawasan kasus ini masuk dalam kategori pengawasan *a-posteriori* karena kebijakan BLT BBM tidak tersalurkan pada *driver* ojek online yang membutuhkan bantuan dan berdampak pada kebijakan kenaikan BBM. Selanjutnya, kasus kesebelas adalah terkait dengan adanya aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota dewan untuk memberhentikan Direktur Utama PT. JSC yang merupakan BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Anggota dewan menyampaikan usulan masyarakat tersebut kepada Gubernur karena dianggap terdapat kebijakan penertiban UMKM pada Kawasan JSC saat pagelaran Forum Olahraga dan Rekreasi Nasional (FORNAS) dianggap keliru (<https://beritapagi.co.id/>, 2022). Kasus ini masuk dalam jenis pengawasan *a-posteriori* karena hal ini merupakan Langkah korektif dari kebijakan yang dianggap keliru.

Kasus kedua belas adalah persoalan banjir di Kota Palembang yang merupakan keluhan yang datang dari masyarakat Ilir Timur 1, dan akan disampaikan oleh anggota dewan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (<https://beritapagi.co.id/>, 2022). Jenis pengawasan kasus ini adalah jenis *a-posteriori*, dimana terdapat permasalahan yang terjadi yaitu banjir, dan anggota dewan melakukan Tindakan korektif untuk

dapat mengantisipasi hal tersebut terjadi Kembali. Kasus terakhir adalah adanya aspirasi dari masyarakat untuk menjadikan kampung anyaman di Kawasan kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang menjadi destinasi wisata. Hal tersebut ditindaklanjuti oleh anggota dewan dengan menyampaikan usulan tersebut kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui rapat paripurna (<https://beritapagi.co.id/>, 2022). Pengawasan pada kasus ini berjenis pengawasan *apriori*, yang merupakan Tindakan preventif untuk merumuskan kebijakan pada bidang pariwisata yang lebih baik.

Berdasarkan ketiga belas kasus yang telah diuraikan dalam penelitian ini, terdapat 6 (enam) jenis pengawasan *a-posteriori* dan 7 (tujuh) jenis pengawasan *apriori* yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Sebanyak 6 (enam) kasus yang masuk dalam kategori *a-posteriori* artinya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dan atau dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih memerlukan pembenahan-pembenahan melalui Tindakan korektif yang dilakukan oleh dewan. Komposisi dukungan politik Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan yang sesungguhnya cukup lemah, berkorelasi dengan efektifnya fungsi pengawasan yang dilakukan. Artinya bahwa anggota dewan dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan optimal tanpa terdapat tendensi atau kepentingan politik. Dinamika *check and balances* yang cukup tinggi intensitasnya ini sesungguhnya merupakan hal yang positif dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, 7 (tujuh) pengawasan yang berjenis *apriori* juga menandakan bahwa DPRD Provinsi Sumatera Selatan telah memberikan cukup banyak usulan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka perumusan kebijakan yang lebih baik. Hal ini berarti bahwa Tindakan-tindakan preventif juga banyak dilakukan sebagai bentuk 'intervensi' dalam konteks yang positif yang dilakukan oleh anggota dewan kepada kepala daerah. Secara tidak langsung, dominannya jenis pengawasan *apriori* yang dilakukan oleh anggota dewan menjadi tanda bahwa perumusan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah belum cukup efektif dalam menyelesaikan persoalan public.

Pengawasan dengan jenis *apriori* dan *a-posteriori* yang telah dilakukan oleh anggota dewan, berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan berjalan dengan dinamis dan kuantitas yang cukup tinggi. Namun, kontrol masyarakat atas pengawasan-pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan terhadap kebijakan pemerintah memang belum memiliki mekanisme yang jelas. Tidak hanya itu, sesungguhnya kontrol anggota dewan sendiri atas Tindakan korektif maupun preventif yang dilakukan juga tidak memiliki mekanisme yang terukur. Atas dasar tersebut, efektifitas pengawasan yang telah dilakukan oleh anggota dewan juga tidak dapat dinilai keberhasilannya.

### 3. Kesimpulan

DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan

pengawasan terhadap Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, memiliki intensitas yang cukup tinggi tanpa adanya pengaruh politik. Anggota dewan secara dominan menjalankan jenis pengawasan *a priori* dan *a-posteriori* secara hampir seimbang, terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Komposisi dukungan politik yang rendah dari Gubernur dan Wakil Gubernur sesungguhnya malah dapat membentuk pengawasan yang cukup optimal, namun tidak adanya mekanisme control terhadap hasil pengawasan yang telah disampaikan kepada kepala daerah dan perangkatnya membuat efektifitas pengawasan tersebut sesungguhnya tidak dapat dinilai tingkat keberhasilannya.

Maka dari itu penulis memberikan rekomendasi agar DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merumuskan mekanisme berupa sistem agar dapat mengkontrol hasil pengawasan yang telah disampaikan agar dapat mengetahui Tindak lanjut yang telah dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat.

#### Daftar Pustaka

- Anam, S., & Anwar, K. (2020). Efektivitas Fungsi Pengawasan Dprd dalam Pelayanan Publik. Reformasi, 10 No, 1.
- Adhitana, a., astrika, L., & Harsasto, P. (2018). FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP KEPALA DAERAH DI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016. Journal of Politic and Government Studies, 7(3), 181-190. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/21130>
- Kariem, M. Q. (2018). Analisis Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terhadap Implementasi Keistimewaan. Politika: Jurnal Ilmu Politik, 9(2), 61-81. <https://doi.org/10.14710/politika.9.2.2018.61-81>
- Kurniawan, R. (2018). Mekanisme Pengawasan DPRD terhadap Penggunaan APBD oleh Pemerintah Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah di Indonesia. Jurnal Yuridis UNAJA, 1(1), 55-72.
- Ma'ruf, M. F. (2019). Kompetensi Anggota DPRD Dalam Mendukung Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Daerah. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, 4(1), 55-66.
- Saputra, Y. (2019). Pengawasan DPRD DIY Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Penggunaan Dana Keistimewaan. Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, 1(2), 86-107.
- Sakti, F. T., & Fauzia, S. N. (2018). Pengaruh Pengawasan Pajak Hotel Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut). JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 8(1), 160-173.
- Sulaiman, King Faisal. (2017). Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya, Thafa Media : Yogyakarta
- Syafiie, Inu Kencana. (2014). Proses Legislatif, Refika Aditama : Bandung
- Zed, M. (2018). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- DPRD Sumsel Kritik Kerusakan Jalan Nasional Palembang – Musi Rawas, Gubernur: Selama Ini Memang Tambal Sulam, diakses : <https://www.rmolsumsel.id/dprd-sumsel-kritik-kerusakan-jalan-nasional-palembang-musi-rawas-gubernur-selama-ini-memang-tambal-sulam>, pada 20 Januari 2023
- DPRD Sumsel Serahkan Rekomendasi Terhadap LKPI TA 2020 Ke Gubernur Sumsel, diakses : <https://sumselpost.co.id/2021/05/03/dprd-sumsel-serahkan-rekomendasi-terhadap-lkpi-ta-2020-ke-gubernur-sumsel/>, pada 20 Januari 2023
- Fraksi-Fraksi di DPRD Sumsel Kritik Pemprov Sumsel, diakses : <https://beritasebelas.id/fraksi-fraksi-di-dprd-sumsel-kritik-pemprov-sumsel/>, pada 20 Januari 2023
- Ketua DPRD Sumsel Kritik Pembangunan Jalan di Palembang, diakses : <https://www.rmolsumsel.id/ketua-dprd-sumsel-kritik-pembangunan-jalan-di-palembang>, pada 20 Januari 2023
- Komisi V DPRD Sumsel Pertanyakan Efektivitas Surat Edaran Gubernur Sumsel Soal Belajar Daring, diakses : <https://sumselpost.co.id/2021/01/14/komisi-v-dprd-sumsel-pertanyakan-efektivitas-surat-edaran-gubernur-sumsel-soal-belajar-daring/>, 20 Januari 2021
- 75 Anggota DPRD Sumsel dilantik,

- diakses : <https://dprd.sumselprov.go.id/75-anggota-dprd-sumsel-terpilih-dilantik/> pada 19 Januari 2023.
- diakses pada : <https://www.gatra.com/news-474274-politik-cegah-corona-dprd-sumsel-desak-lockdown.html>
- Hasil Final, Herman Daru Unggul di Pilgub Sumsel, Diakses:<https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/08/07/2018/hasil-final-herman-daru-unggul-di-pilgub-sumsel/> pada 19 Januari 2023
- Pilgub Sumsel, Nasdem Tak Takut Lawan Anak Gubernur" selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180108073211-32-267319/pilgub-sumsel-nasdem-tak-takut-lawan-anak-gubernur> pada 19 Januari 2023
- 200 Ribu Masyarakat Miskin Di Palembang Baru 45 Ribu Yang Terima PKH, diakses : <https://beritapagi.co.id/2021/12/06/200-ribu-masyarakat-miskin-di-palembang-baru-45-ribu-yang-terima-pkh/> pada 20 Februari 2023
- DPRD Sumsel Pertanyakan Anggaran Rp16 M Untuk Pembelian Gerbong Dan Kontainer Batubara Stasiun Simpang, diakses : <https://beritapagi.co.id/2021/12/05/dprd-sumsel-pertanyakan-anggaran-rp16-miliar-untuk-pembelian-gerbong-dan-kontainer-batubara-stasiun-simpang/> pada 20 Februari 2023
- Wagub Sumsel Akui Pengamanan Aset Pemprov Sumsel Terkendala Bermacam Masalah, diakses : <https://beritapagi.co.id/2021/04/26/wagub-sumsel-akui-pengamanan-aset-pemprov-sumsel-terkendala-bermacam-masalah/> pada 20 Februari 2023
- DPRD Sumsel segera panggil Pertamina bahas antrean kendaraan di SPBU, diakses : <https://sumsel.antaranews.com/berita/667597/dprd-sumsel-segera-panggil-pertamina-bahas-antrean-kendaraan-di-spbu> pada 20 Februari 2023
- Karyawan Sampai Mogok Kerja Tuntut Pembayaran Gaji, Ketua DPRD Sumsel Kritik Pengelola JSC, <https://palembang.tribunnews.com/2021/04/16/karyawan-sampai-mogok-kerja-tuntut-pembayaran-gaji-ketua-dprd-sumsel-kritik-pengelola-jsc>.
- DPRD Segera Bahas Distribusi 30.000 Vaksin Sinovac di Sumsel, diakses : <https://sumselpost.co.id/2021/01/05/dprd-segera-bahas-distribusi-30-000-vaksin-sinovac-di-sumsel/>
- Cegah Corona DPRD Sumsel desak Lockdown, DPRD Sumsel Suport Percepatan Pembangunan Infrastruktur Di Muba, diakses : <https://beritapagi.co.id/2022/10/15/dprd-sumsel-suport-percepatan-pembangunan-infrastruktur-di-muba/>
- Fraksi Partai Golkar DPRD Sumsel Ingatkan Banyak Jalan Kabupaten Di Sumsel Yang Rusak, diakses : <https://beritapagi.co.id/2022/09/26/fraksi-partai-golkar-dprd-sumsel-ingatkan-banyak-jalan-kabupaten-di-sumsel-yang-rusak/>
- Soal Nasib Driver Online, Komisi V DPRD Sumsel Cari Payung Hukum, diakses : <https://beritapagi.co.id/2022/09/20/soal-nasib-driver-online-komisi-v-dprd-sumsel-cari-payung-hukum/>
- DPRD Sumsel Rekomendasikan Ke Gubernur Sumsel Evaluasi Kinerja Dirut JSC, diakses : <https://beritapagi.co.id/2022/07/20/dprd-sumsel-rekomendasikan-ke-gubernur-sumsel-evaluasi-kinerja-dirut-jsc/>
- Warga IT I Minta DPRD Sumsel Selesaikan Persoalan Banjir, diakses : <https://beritapagi.co.id/2022/07/22/warga-it-i-minta-dprd-sumsel-selesaikan-persoalan-banjir/>
- Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Perjuangkan Kampung Wisata Anyaman Sebagai Destinasi Wisata, diakses : <https://beritapagi.co.id/2022/12/04/wakil-ketua-komisi-v-dprd-sumsel-perjuangkan-kampung-wisata-anyaman-sebagai-destinasi-wisata/>